

Perusahaan negara ini tengah dipelototi publik akibat sering mematikan aliran listrik secara bergiliran. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengaku, pemakaian listrik di Pulau Jawa sudah *overload*, bahkan untuk Jawa Barat dan Banten telah defisit. Dengan 51.171 pelanggan yang mengonsumsi lebih dari 6.600 kWh, pada Mei lalu konsumsi listrik melonjak hingga 44 juta kWh.

Untuk itulah, PLN mengaudit industri, kantor pemerintah, dan rumah tangga yang penggunaan listriknya minimal 6.600 kWh per bulan. Audit listrik juga perlu dilakukan secara internal. Siapa tahu banyak turbin ataupun jaringan PLN yang sudah tidak optimal.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengaku rugi miliaran rupiah akibat pemadaman listrik tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ternyata konsumen rumah tangga pun turut menjerit dan mengomel. Hal itu menjadi bukti bahwa ketertinggalan terhadap listrik sudah demikian kental. Bisa jadi hal ini merupakan kesuksesan pemerintah memasyarakatkan listrik.

Hanya, taklala hampir semua elemen masyarakat familier dengan PLN, giliran perusahaan ini kewalahan karena lamban membarui dan mengke-stensifikan sumber energi sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Lisrik dan prestise

Awalnya, program listrik masuk desa pada dekade 1980-an yang membuat 90 persen masyarakat desa familier dengan listrik. Bukan hanya rumah tembok, rumah panggung dan kardus pun hampir pasti memiliki instalasi listrik. Listrik menjadi media bagi produsen elektronik untuk "mencekokkan" produksinya kepada masyarakat. Ja-

ringan dipangkas tanpa basa-basi.

Dalam spanduk tertulis "Relakan Pohon Anda". Tidak ada permohonan izin atau maaf. Namun, bila ada kesalahan menghitung biaya penggunaan listrik, dengan gampang hal itu dikompensasikan dengan pemakaian bulan berikutnya. Posisi seperti inilah yang memperlambat PLN membangun *front line excellence*.

Regulasi dan konsumsi

Pertumbuhan penduduk sekitar 2 persen per tahun berdampak pada kenaikan kebutuhan listrik. Nilai jual rumah bertambah, taklala ada fasilitas listrik. Demikian juga dengan status sosial penghuninya. Banyak rumah kumuh diantaran kali sudah terpasangi jaringan listrik PLN.

Izin mendirikan bangunan dari pemerintahan lokal tidak diperlukan. Tidak perlu dipertimbangkan pula status tanah dan legalitas lokasi. Dampaknya, persoalan pertanian lahan-lahan berubah-ubah sering menuai keributan dari penghuninya karena ketidakkompatan antara PLN dan pemerintah daerah dalam memperlakukan mereka.

Pola konsumsi listrik masyarakat perlu dirégulasi. Pembatasan kepemilikan barang elektronik menjadi perlu agar tidak kehilangan kontrol dalam mendapatkan barang elektronik yang menjajakan barang secara kredit sepatutnya diatur ulang. Mungkin hal itu akan mengurangi pendapatan pajak dan retribusi, tetapi lebih menyehatkan sirkulasi kehidupan sosial.

Tanpa regulasi, semakin banyak orang terjerat utang dan harus rela pendapatannya dipotong atau digusur *debt collector*. Dampaknya, kebutuhan pokok semakin men-

Kesuksesan pejabat jangan ditukur dengan kepemilikan materi berlimpah. Hidup sederhana perlu direspons secara integratif dari semua komponen kabinet. Pola ini bertumpu pada keseragaman antara penerimaan dan pengeluaran. Kredit bisa menyebabkan keseragaman terganggu. Teladan pejabat menjadi kebiasaan dalam keseragaman. Maraknya kartu kredit bisa mengganggu hidup sederhana. Dengan kartu elektronik ini listrik mahal pun dapat dibayar tanpa terasa.

PLN berperan dalam menyeleksi usulan penambahan daya. Mungkin tidak semua diluluskan. Diperlukan pengecekan lapangan agar kebutuhan konsumtif bisa terukur dikurangi. Kepercayaan masyarakat perlu dijaga dengan sikap dan perilaku petugas PLN yang simpatik. Jangan lagi ada spanduk yang berbunyi "Relakan...". Ganti-lah dengan "Mohon Direlakan...". Kata-kata simpatik lain yang tidak berada arcamannya. Pejabat PLN pantas memberikan contoh penghematan listrik dan melakukan pembinaan secara internal. Tidak ada petugas PLN yang boros bercampur arogan.

Perkuat konsolidasi dengan pemerintah daerah untuk menyertai konsolidasi internal. Menjalin kerja sama dengan kalangan pendidik merupakan langkah yang perlu dilakukan dalam hemat energi dan mendorong kegiatan produktif. Etika dan penghargaan terhadap pelanggan merupakan langkah yang patut terus disingkatkan dengan membuka transparansi soal perlistrikan.

ASEF SUMARYANA
Staf Pengajar
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
FISIP Unpad dan
Sekretaris LP3AN Unpad

V/45